

**PENINGKATAN KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN
2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA**

T E S I S

**Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh gelar
magister dalam ilmu hukum**



Oleh :

Edi Syahputra

NPM : 14260003

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM "IBLAM"
JAKARTA
2017**

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”
JAKARTA**

Edi Syahputra
NPM : 14260003

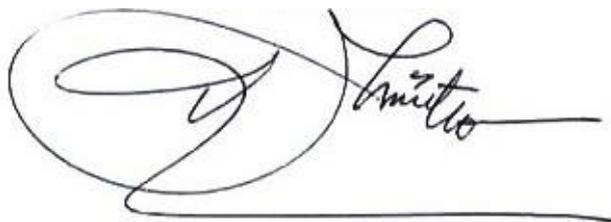
Judul :

**PENINGKATAN KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI PEGAWAI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR
SIPIIL NEGARA**

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk
diujikan/dipertahankan

Jakarta, 10 Februari 2017

Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adi Sujatno', with a long horizontal line extending to the right.

Dr. Adi Sujatno, SH., MH

Pembimbing II

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Iman Santoso', with a short horizontal line extending to the right.

Dr. Iman Santoso, SH., MH.

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”

JAKARTA

Bahwa isi / materi tesis yang berjudul :

**PENINGKATAN KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI PEGAWAI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR
SIPIIL NEGARA**

Seluruhnya merupakan tanggungjawab ilmiah dan tanggungjawab moral
penulis

Jakarta, 10 Februari 2017

6000

Edi Syahputra

ABSTRAK

Judul Tesis : PENINGKATAN KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Nama / NPM : Edi Syahputra / 14260003

Kata Kunci : Kompetensi Pegawai, kementerian Hukum dan HAM, Pelayanan Publik

Semangat reformasi telah mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan sistem pemerintahan negara dalam pembangunan, perlindungan dan pelayanan masyarakat guna mendorong kebutuhan serta kepentingan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan merupakan wujud tanggung jawab pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan bangsa dan negara. Mengetahui bahwa kinerja birokrasi di Indonesia rendah, maka diperlukan adanya peningkatan kompetensi terhadap aparatur yang baik secara individu maupun kelompok guna meningkatkan produktivitas dan profesionalitas kerja. Kompetensi dalam hal ini mengarah pada kompetensi birokrasi yaitu kemampuan yang dimiliki oleh para pegawai ASN khususnya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Rumusan masalah yang penulis bahas dalam tesis ini adalah (1) Bagaimana strategi Kementerian Hukum dan HAM dalam meningkatkan kompetensi dan kualifikasi pegawainya untuk meningkatkan pelayanan publik ?, (2) Apa yang menghambat upaya Kementerian Hukum dan HAM dalam meningkatkan Kompetensi dan Kualifikasi pegawainya untuk meningkatkan pelayanan publik ?. Adapun penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu memberikan gambaran tentang strategi Kementerian Hukum dan HAM dalam meningkatkan kompetensi dan kualifikasi pegawainya untuk meningkatkan pelayanan publik dan hal yang menghambat upaya Kementerian Hukum dan HAM dalam meningkatkan Kompetensi dan Kualifikasi pegawainya untuk meningkatkan pelayanan publik, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Akhirnya penulis berkesimpulan bahwa Upaya Kementerian Hukum dan HAM dalam meningkatkan Kompetensi dan Kualifikasi pegawainya untuk meningkatkan pelayanan publik adalah menciptakan SDM Hukum dan HAM yang benar-benar berkualitas, bersih dan bermartabat. Dengan perkataan lain, dalam arus utama penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta perubahan yang bergerak demikian cepat, Kementerian Hukum dan HAM harus didukung oleh sumber daya manusia yang tidak saja memiliki intelektualitas yang tinggi.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Landasan Teori dan Kerangka Konseptual.....	10
1. Landasan Teori.....	10
2. Kerangka Konseptual.....	14
E. Metode Penelitian	23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep dan Pengertian Birokrasi.....	26
B. Tipologi Birokrasi Publik.....	38
C. Kompetensi, Arti, Mengapa, dan Bagaimana.....	41
D. Tata Kelola Pegawai Negeri Sipil di Indonesia.....	57
E. Profil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.....	66
F. Memahami Aparatur Sipil Negara Menurut Undang-	

Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.....	72
BAB III STRATEGI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI PEGAWAI UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK	
A. Aparatur Sipil Negara Sebagai Pelayan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014....	97
B. Mengembangkan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi.....	101
C. Pahami Indikator Kinerja Birokrasi Sebagai Pelayan Publik.....	111
D. Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Integritas dan Transparansi Dimulai Dari Kantor Wilayah.....	118
BAB IV UPAYA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MENGATASI HAMBATAN MENINGKATKAN KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI PEGAWAI UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK	
A. Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM	121
B. Memetakan Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Pada BPSDM Kementerian Hukum dan HAM.....	129

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 136

B. Saran..... 138

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP